



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7434-7450

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Modal Keuangan Daerah

Rifaldy Rizky Hermawan<sup>1✉</sup>, Solehudin<sup>2</sup>

(1) Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang

(2) Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [rifaldyrizky3@gmail.com](mailto:rifaldyrizky3@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Modal Belanja terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data sekunder, data tersebut diperoleh dari internet <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> yang merupakan situs resmi yang sudah diaudit sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan <https://jabar.bps.go.id>. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, analisis korelasi, uji t, analisis regresi linier berganda, pengujian uji F, dan analisis koefisien determinasi, dan pengelolaan data dibantu dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 20. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya, besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi yaitu 5,3% sedangkan Belanja Modal 6,7% terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Keuangan*

## Abstract

This research was conducted with the aim of examining and analyzing the effect of Economic Growth and Capital Expenditure on the Level of Regional Financial Independence in Regency/City Regional Governments in the West Java Province region. The sample of this research is the Local Government Budget Realization Report in West Java Province. The method used in this research is descriptive and verification method. Data collection techniques were carried out using secondary data, the data was obtained from the internet <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> which is an official site that has been previously audited by the Supreme Audit Agency (BPK) and <https://jabar.bps.go.id>. Statistical analysis used in this study were normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, correlation analysis, t test, multiple linear regression analysis, F test test, and analysis of the coefficient of determination, and data management assisted by using software IBM SPSS 20. Based on the results of research that has been done Economic Growth and Capital Expenditures have a positive effect on the Level of Regional Financial Independence. Furthermore, the magnitude of the effect of economic growth is 5.3% while capital expenditure is 6.7% on the level of regional financial independence

*Keyword: Economic Growth, Capital Expenditure, Level of Financial Independence*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehinggadaerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Haltersebut dimaksudkan agar daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan. Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan masing - masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing - masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing - masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, serta pembangunan daerah bias diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Sumber- sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Muliana (2009) menyatakan bahwa PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digalidari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Struktur PAD yang kuat juga menunjukkan daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemkot. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka Pemkab/Pemko tersebut dapat dikatakan mandiri (Muliana,2008). PAD itu sendiri merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangandaerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerahitu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat.

Permasalahan PAD Pemda di wilayah Jawa Barat terjadi dikarenakan diantaranya pajak restoran dan hiburan yang tidak memenuhi target, sektor wisata yang belum maksimal, anggaran APBD yang belum maksimal, banyaknya potensi pajak yang tidak bias dikumpulkan, retribusi parkir yang masih rendah dan, kontribusi PAD yang masih berada pada tingkat yang rendah. Beberapa hal tersebut yang mengakibatkan masalah dalam Pendapatn Asli Daerah di beberapa Kota/kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:15) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai "...metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan." Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018:48) "...dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel yang bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain."

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Teknik sampling yang digunakan penulis yaitu menggunakan *Non Probability Sampling* dengan menggunakan dengan menggunakan sampling jenuh. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Laporan Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 27 Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan dikalikan 3 tahun.

Hipotesis nol ( $H_0$ ) merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternative ( $H_a$ ) merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan berpengaruh atau tidaknya variabel-variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Berikut ini analisis dan pembahasan mengenai variabel pertumbuhan ekonomi, belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun (2016 – 2018). Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018

#### Kriteria Pertumbuhan Ekonomi

pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik. Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018 Berdasarkan data Rasio belanja modal terhadap belanja daerah untuk menilai Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018 kriterianya sebagai berikut :

#### Kriteria Penilaian Belanja Modal

Interval	Kategori Belanja Modal
10,24% - 15,59%	Sangat Rendah
15,59% - 20,93%	Rendah
20,93% - 26,28%	Sedang
26,28% - 31,63%	Tinggi
31,63% - 36,97%	Sangat Tinggi

Sumber : *Data diolah*

Dapat dilihat rata-rata Rasio belanja modal terhadap belanja daerah seluruh Daerah Kab/Kota selama periode tahun 2016-2018 sebesar 20.99% dan dikategorikan sedang karena pada interval 20,93% - 26,28%. Artinya, belanja modal sudah cukup baik. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Interval	Kategori Pertumbuhan Ekonomi
1.77% - 4.70%	Sangat Rendah
4.70% - 7.64%	Rendah
7.64% - 10.58%	Sedang
10.58% - 13.51%	Tinggi
13.51% - 16.45%	Sangat Tinggi

Sumber : *Data diolah*

Dapat dilihat rata-rata *Growth* PDRB seluruh Daerah Kab/Kota selama periode tahun 2016-2018 sebesar 9.08% masih di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018. Berdasarkan data Rasio PAD terhadap Total Pendapatan daerah untuk menilai Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018 yang diteliti berikut hasil statistik deskriptif dari pengolahan data termasuk dalam kategori sedang karena berada di interval 7,64% - 10,58%. Artinya,

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016- 2018. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Skala	Kriteria
00,00% - 25,00%	Sangat Rendah
25,01% - 50,00%	Rendah
50,01% - 75,00%	Sedang
75,01% - 100,00%	Tinggi

*Sumber (Sugiyono, 2016:231)*

Dapat dilihat rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 22,32% menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2016- 2018 masuk pada kriteria sangat rendah karena berada pada interval 0% – 25%. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan daerah seluruh Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat selama periode 2016-2018 yang diteliti masih sangat rendah.

## Analisis Verifikatif

### a. Hasil Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang baik apabila residual nilai taksiran model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistic dengan Uji Kolmogorov-Smirnov dan metode grafik. Dengan melakukan pengujian ini, peneliti dapat mengetahui data residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian ini, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$

Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.10848059
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		1.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.166

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil pengujian normalitas data *unstandardized residual* model regresi diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,115 dengan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* senilai 0,166. Nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data *unstandardized residual* model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan kondisi variabel independen dalam model regresi yang saling berkorelasi sempurna. Hal ini menjadikan persamaan regresi yang diperoleh tidak tepat dalam menjelaskan pengaruh X terhadap Y. multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel bebas erat atau tidak.

Hasil Nilai VIF Uji Moltikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Rasio BM	.999	1.001
Rasio Pertumbuhan Ekonomi	.999	1.001

a. Dependent Variable: Rasio KKD

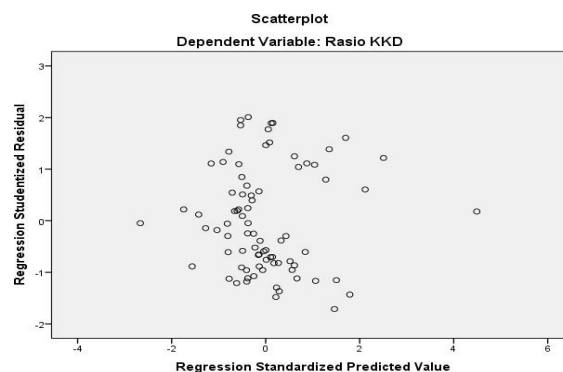
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 20

Dari tabel di atas diketahui nilai VIF (*Value Inflation Factor*) untuk variable x dalam model regresi masing-masing sebesar 1,001. Nilai VIF lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa data variable bebas dalam persamaan model regresi yang digunakan tidak terdapat hubungan yang kuat antara hubungan, yang berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada suatu model regresi yang baik varians nilai residual dari pengamatan memiliki kondisi homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Grafik Uji Heterokedastisitas



Dari grafik *scatterplots* 4.5 di atas dapat dilihat titik-titik data tidak menunjukkan pola atau bentuk tertentu. Titik data menyebar secara acak serta menyebar secara merata di atas sumbu X maupun di atas sumbu Y. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0, titik-titik dengan pola yang tidak beraturan. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas s pada model regresi linier.

c. Hasil Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menilai korelasi antar nilai residual yang ada dalam model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat masalah autokorelasi di dalamnya.

Hasil Uji *Durbin-Watson* (D-W)

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.346 <sup>a</sup>	.120	.097	.10986	1.714

a.Predictors: (Constant),

Diperoleh nilai statistik *Durbin-Watson* (D-W) untuk model regresi sebesar 1,714. Nilai D-W yang diperoleh dari model dibandingkan terhadap nilai tabel *Durbin-Watson*. Apabila nilai *Durbin-Watson* terletak diantara du dan 4-du maka data tersebut bebas dari masalah autokorelasi.

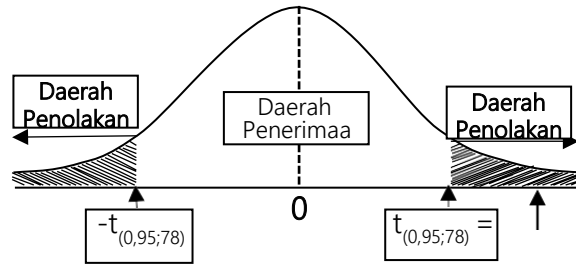
Analisis Regresi Linier

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Uji Parsial (Uji t) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Hipotesis	Thitung	Sig (p)	T tabel	α	Keputusan	Keterangan
H0 : • 1 = 0	2,124	0,037	1,991	5%	H0 ditolak	Signifikan

## Daerah penerimaan dan penolakan uji t variabel X1



$t = s$ Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang berarti pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin mandiri daerah tersebut.

Sesuai dengan yang kemukakan oleh Putri (2014) bahwa apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tinggi.

### Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

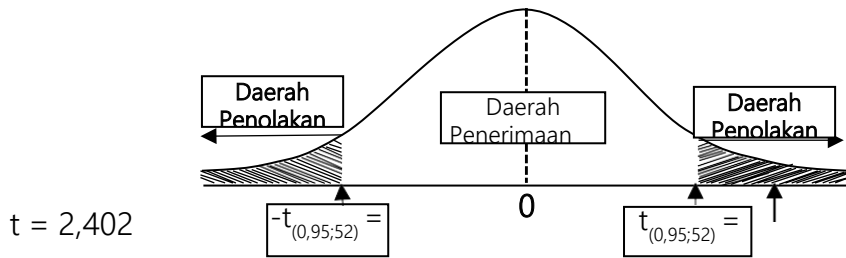
#### Uji Parsial (Uji t) Variabel Belanja Modal (X2)

Hipotesis	Thitung	Sig (p)	ttabel	$\alpha$	Keputusan	Keterangan
$H_0 : \rho = 0$	2,402	0,019	1,991	5%	$H_0$ ditolak	Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

### Daerah penerimaan dan penolakan uji t variabel X2

Nilai  $t_{hitung}$  sebesar = 2,124 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,991 ( $t_{hitung} = 2,124 > 1,991$ ), maka diperoleh hasil pengujian  $H_0$  ditolak. Nilai signifikansi uji 0,037 lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulan uji signifikan. Jadi Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tingkat



Nilai thitung sebesar = 2,402 lebih besar dari nilai positif ttabel sebesar 1,991 (thitung = 2,402 > 1,991), maka diperoleh hasil pengujian Ho ditolak. Nilai signifikansi uji 0,047 lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulan uji signifikan.

Jadi Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018. Dalam hal ini belanja modal berpengaruh khususnya dalam pengembangan sarana prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2018.

Didukung penelitian yang dilakukan oleh Rostina (2014) dan Simatupang (2016) bahwa jika belanja meningkat maka akan meningkatnya tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja – belanja daerahnya termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor. Maka dari itu jika belanja modalnya meningkat maka tingkat kemandirian keuangannya pun dapat meningkat.

Pengujian Simultan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

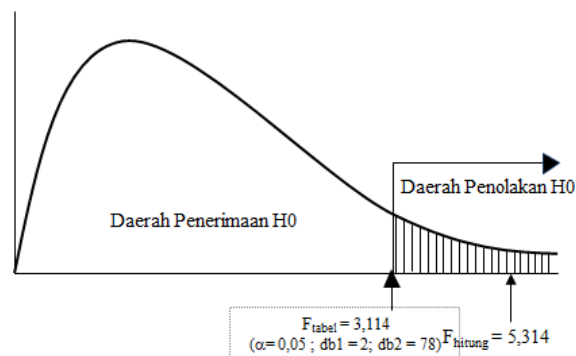
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.128	2	.064	5.314	.007b
Residual	.941	78	.012		
Total	1.070	80			

- a. Dependent Variable: Rasio KKD
- b. Predictors: (Constant), Rasio Pertumbuhan Ekonomi , Rasio BM

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.16 diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 5,314 dengan  $p-value$  sebesar 0,007. Nilai  $F_{tabel}$  diperoleh dari tabel distribusi F pada taraf signifikansi sebesar 5% dengan derajat bebas 1 ( $db_1$ ) sebesar  $k = 2$  dan derajat bebas 2 ( $db_2$ ) sebesar  $(n-k-1) = 81-2-1 = 78$  sebesar 3,114.

Hasil uji menunjukkan Nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $5,314 > 3,114$ ) dan  $p-value$  (signifikansi) lebih kecil dari  $\alpha$  penelitian 0,05 ( $0,007 < 0,05$ ). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau dengan kata lain uji signifikan. Perbandingan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada daerah penerimaan dan penolakan uji F dalam gambar berikut :



Daerah penerimaan dan penolakan uji F

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018.

Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinan menunjukkan besarnya pengaruh variable bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Koefisien Determinasi X terhadap Y

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.346 <sup>a</sup>	.120	.097	.10986

a. Predictors: (Constant), Rasio Pertumbuhan Ekonomi , Rasio BM

b. Dependent Variable: Rasio KKD

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Diperoleh nilai R square dari perhitungan SPSS pada tabel 4.17 diperoleh

Nilai beta dan Nilai zero order

Koefisien Determinasi Parsial X terhadap Y

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Standar di zed Coefficie nts	Correlations			
		Beta	Zero- order	Parti al	Part
(Constant)					
1 Rasio BM	.226	.234	.234	.226	
Rasio Pertumbuhan Ekonomi	.255	.263	.262	.255	

a. Dependent Variable: Rasio KKD

Berdasarkan tabel di atas dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pengaruh } X_1 \text{ terhadap } Y = 0,226 \times 0,234 = 0,053$$

Pertumbuhan Ekonomi (X1) memberikan pengaruh sebesar 5,3% terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Jabar sebesar 0,120. Jadi besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah 20,3% dan sisanya sebesar  $100\% - 12,0\% = 88,0\%$  dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini seperti dana perimbangan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sejalan dengan penelitian wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018.

$$\text{Pengaruh } X_2 \text{ terhadap } Y = 0,255 \times 0,263 = 0,067$$

Belanja Modal (X2) memberikan pengaruh sebesar 6,7% terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan masuk kategori sedang. Kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat masih belum tinggi. Lalu beberapa faktor diantaranya kinerja pertanian yang dipantau melambat akibat musim kemarau panjang yang turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan permintaan masyarakat menurun dan proses produksi yang tertahan.
2. Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan masuk kategori sedang. Rasio belanja modal terhadap belanja daerah seluruh Daerah Kab/Kota selama periode tahun 2016-2018 termasuk dalam kategori sedang dikarenakan tidak sejalan kebijakan dengan pemerintah yang meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran yang antara lain dengan meningkatkan porsi anggaran belanja modal terhadap total belanja
3. Tingkat Kemandirian di wilayah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan masih rendah. Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018 masuk pada kriteria sangat rendah dikarenakan semua komponen pajak daerah yang melambat dan perlambatan pertumbuhan terjadi pada pajak pokok. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan daerah seluruh Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat selama periode 2016-2018 yang diteliti masih sangat rendah.
4. Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Daerah Kab/Kota dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi (pertumbuhan PDRB) yang besar cenderung memiliki Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang lebih tinggi. Hal ini berarti Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Belanja Modal memberikan pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Daerah Kab/Kota dengan Belanja Modal yang besar cenderung memiliki Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang tinggi. Hal ini berarti Belanja Moda dapat berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alam, S. 2007. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Arsyad, Lincolin. 2005. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. 2010. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Bogora: Ghalia Indonesia.
- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erlina dan Rasdianto, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- Ghazali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Terjemahan Mangunsong*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, Jan. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husein, Umar. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka.
- Kurniawan, Albert. 2014. *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori Konsep dan Praktik Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*.  
Yogyakarta:

Andi. \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.

Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan Keenam. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.